

Dukungan bagi perencanaan strategis kehutanan jangka menengah dan jangka panjang

Mengapa mendukung perencanaan kehutanan jangka menengah dan jangka panjang?

Perencanaan strategis jangka menengah merupakan instrumen manajemen yang penting bagi instansi pemerintah agar kebijakan dapat dijalankan. Dengan menetapkan prioritas, menentukan target, mengidentifikasi program pelaksana dan merinci dengan jelas indikator kinerja, maka perencanaan strategis memberikan peta, kerangka waktu dan daftar yang berisi hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi, serta diawasi agar tujuan kebijakan dapat dicapai.

Di Indonesia setiap instansi pemerintah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota pada setiap tingkatan diharuskan menyusun Rencana Strategis Lima Tahun, sebagai Rencana Jangka Menengah, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya rencana strategis jangka menengah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan, sebagai rencana yang lebih operasional.

Untuk sektor kehutanan juga ditetapkan adanya rencana sektoral jangka panjang di tiap tingkat (nasional, provinsi dan kabupaten/kota) untuk memberikan orientasi menyeluruh bagi perencanaan pembangunan di sektor kehutanan.

Meskipun sudah diatur secara lengkap dan menyeluruh, proses perencanaan dalam praktiknya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

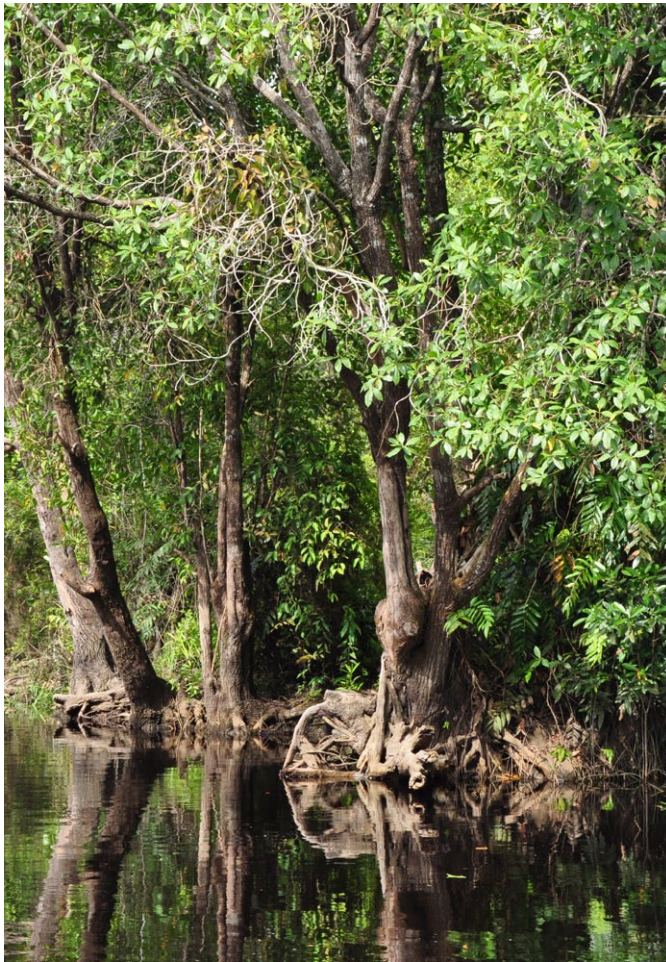
- Keterkaitan dan logika antara perencanaan jangka panjang/ menengah/ dengan perencanaan tahunan/ operasional, serta bagaimana menyelaraskan rencana dari tingkat-tingkat pemerintahan yang berbeda (nasional, provinsi dan kabupaten/kota), dirasakan masih belum jelas.
- Kurangnya data yang memadai untuk mendukung proses perencanaan.
- Sistem monitoring dan evaluasi yang belum memadai.
- Kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia untuk menyusun dokumen perencanaan dan mengembangkan indikator yang terukur masih kurang, terutama di tingkat kabupaten/kota.
- Terbatasnya mekanisme untuk menampung aspirasi pemangku kepentingan.



Dukungan yang kami Berikan

FORCLIME Programme mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengintegrasikan seluruh tujuan pemerintah terkait dengan mitigasi perubahan iklim kedalam rencana strategi jangka menengah dan jangka panjang. Kami membantu membangun kapasitas staf pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan yang lebih berkualitas dan membentuk sistem untuk memantau pelaksanaannya. Sesuai dengan konsep Program Kehutanan Nasional (NFP), kami mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan strategi. Kami melakukan fasilitasi di berbagai tingkat pemerintahan guna menghindari terjadinya tumpang tindih dan mengidentifikasi kaitan-kaitan pokok yang ada.





Pencapaian

- Mendukung penyusunan pedoman tentang bagaimana menyusun rencana strategis jangka menengah bagi unit kerja Kementerian dan dinas kehutanan daerah.
- Membantu Pemerintah Provinsi (Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat) mengkaji kembali dan merevisi Rencana Strategis Kehutanan Jangka Menengah yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan pedoman dan pelatihan yang telah dilaksanakan.
- Memfasilitasi unit kerja di Kementerian Kehutanan dan dinas kehutanan di tingkat provinsi dan kabupaten dalam menyusun dokumen perencanaan.
- Membantu membangun Sistem Informasi Kehutanan di daerah untuk meningkatkan ketersediaan data dasar.
- Renstra 2015-2019 disusun dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan auditor dari Inspektorat Jenderal telah dilatih untuk memonitor kepatuhan.

Forests and Climate Change (FORCLIME)

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ)

RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 - 2019

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2015-2019 disusun sejalan dengan target nasional dalam mitigasi perubahan iklim, prinsip-prinsip tata kelola kehutanan dan tujuan pembangunan.

Tujuan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah: (1) memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia; (2) sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta (3) secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangsan bagi perekonomian nasional.

Peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019:

- (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan Daerah Aliran Sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;
- (3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Pembelajaran dan Inovasi

Upaya peningkatan kapasitas yang kami lakukan memperkenalkan beberapa inovasi dalam Perencanaan Strategis Kehutanan:

- Perencanaan berdasarkan hasil digunakan sebagai pendekatan untuk menyusun Rencana Strategis melalui pembentukan Indikator Kinerja Pokok pada tingkat capaian.
- Kejelasan mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing diperlukan guna menghindari terjadinya tumpang tindih antar jajaran dan hubungan antara jajaran yang satu dengan yang lainnya, sehingga di masa yang akan datang kami berharap agar perencanaan di tiap-tiap jajaran menjadi selaras dan sinergi.
- Menambah pengalaman dalam menyelenggarakan konsultasi publik sesuai dengan peraturan, dan belajar bagaimana mengkomodasikan hasil kedalam dokumen perencanaan.

Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)

Manggala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0) 21 572 0214
Fax: +62 (0) 21 572 0193
<http://www.forclime.org>